TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN: 2810-0395
e-ISSN: 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i3.9786

# MADRASAH NIZAMIYAH SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK PENDIDIKAN DINASTI SALJUK DALAM KONSOLIDASI ORTODOKSI SUNNI

## Madrasah Nizamiyah as an Instrument of the Seljuk Dynasty's Educational Politics in the Consolidation of Sunni Orthodoxy

**Muhammad Sholeh Afif, Moh Padil, Ni'matuz Zuhroh**
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
msholehafif06@gmail.com; padil@pai.uin-malang.ac.id

**Article Info:**

| Submitted: | Revised: | Accepted: | Published: |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 26, 2026 | May 1, 2026 |

**Abstract**

Although the relationship between education and power has received attention in various previous studies, studies that specifically discuss Madrasah Nizamiyah as a systematic instrument of state religious consolidation through critical sociological analysis remain limited. This study aimed to analyze the role of Madrasah Nizamiyah as an educational-political instrument of the Seljuk Dynasty in consolidating Sunni orthodoxy and building political legitimacy. This study used a qualitative-interpretive approach with a historical-sociological design. Textual data sources were selected deliberately through purposive sampling, including primary works such as *Siyasatnama* by Nizam al-Mulk and *Al-Kamil fi al-Tarikh* by Ibn al-Athir. Data were collected through documentation study and were then analyzed using content analysis and contextual analysis with the theoretical frameworks of Weber's legitimacy theory and Bourdieu's cultural capital. The results showed that the Madrasah Nizamiyah network functioned as a "bureaucratic factory" that effectively converted political capital into symbolic-


Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

religious authority through curriculum standardization, a sustainable *waqf* funding system, and the strategic recruitment of influential ulama such as al-Ghazali. These findings contribute to the development of studies on the sociology of Islamic education and expand understanding of the relationship between religion and the state in medieval Islamic civilization. The conclusion of this study confirms that the institutionalization of education played a crucial role in maintaining social stability and state hegemony. The implications of this study include theoretical contributions to the literature on social reproduction as well as practical recommendations for strengthening the independence of religious educational institutions through financial autonomy and curriculum integration in facing modern ideological challenges.

**Keywords:** Madrasah Nizamiyah; Seljuk Dynasty; Sunni Orthodoxy; Educational Politics; Sociology of Knowledge

**Abstrak:** Meskipun hubungan antara pendidikan dan kekuasaan telah mendapat perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas Madrasah Nizamiyah sebagai instrumen sistematis konsolidasi religius negara melalui analisis sosiologis kritis masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Madrasah Nizamiyah sebagai instrumen politik pendidikan Dinasti Saljuk dalam mengonsolidasikan ortodoksi Sunni dan membangun legitimasi politik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan desain historis-sosiologis. Sumber data tekstual dipilih secara sengaja melalui teknik *purposive sampling*, mencakup karya primer seperti *Siyasatnama* karya Nizam al-Mulk dan *Al-Kamil fi al-Tarikh* karya Ibn al-Athir. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis kontekstual dengan kerangka teori legitimasi Weber dan modal budaya Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Madrasah Nizamiyah berfungsi sebagai "pabrik birokrat" yang secara efektif mengonversi modal politik menjadi otoritas simbolik-keagamaan melalui standardisasi kurikulum, sistem pendanaan wakaf yang berkelanjutan, dan rekrutmen strategis ulama berpengaruh seperti al-Ghazali. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi pendidikan Islam serta memperluas pemahaman tentang hubungan agama dan negara dalam peradaban Islam abad pertengahan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa institusionalisasi pendidikan memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan hegemoni negara. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi literatur reproduksi sosial serta rekomendasi praktis bagi penguatan independensi institusi pendidikan agama melalui kemandirian finansial dan integrasi kurikulum dalam menghadapi tantangan ideologis modern.

**Kata Kunci:** Madrasah Nizamiyah; Dinasti Saljuk; Ortodoksi Sunni; Politik Pendidikan; Sosiologi Pengetahuan

## PENDAHULUAN

Dunia politik dan religius pada pertengahan abad ke-11 menjadi latar belakang krusial bagi kemunculan Madrasah Nizamiyah. Pada tahun 447 H/1055 M, Dinasti Saljuk berhasil merebut Baghdad setelah menggulingkan Dinasti Buwayhi yang bersifat Syiah. Meskipun dominan secara militer, penguasa Saljuk menghadapi tantangan besar dalam membuktikan kekuasaan mereka di hadapan masyarakat Muslim yang mayoritas bermazhab Sunni. Sebagai

pendatang dari etnis Turki yang baru masuk Islam, mereka tidak memiliki akar budaya-intelektual yang kuat dalam tradisi Islam klasik, sehingga kekuatan militer dianggap tidak cukup untuk membangun hegemoni yang tahan lama. Isu utama dalam konteks ini adalah kebutuhan mendesak akan legitimasi kekuasaan melalui penguatan ortodoksi Sunni (Damayanti et al., 2024; Daulay et al., 2025).

Dalam skala global, peran institusi pendidikan sebagai arena negosiasi antara otoritas negara, identitas nasional, dan otoritas keagamaan masih menjadi isu yang sangat relevan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan sering kali menghadapi tekanan birokrasi negara, di mana institusi tersebut harus menegosiasikan antara tuntutan administratif dan upaya mempertahankan tradisi pedagogi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pendidikan dan kekuasaan adalah topik dinamis yang terus berkembang dalam berbagai konteks sejarah maupun kontemporer (Asrori et al., 2025; Ozgen & El Shishtawy Hassan, 2021).

Peneliti berargumen bahwa pendirian Madrasah Nizamiyah merupakan strategi legitimasi yang dirancang secara sistematis oleh Nizam al-Mulk untuk mengonsolidasikan kekuasaan melalui institusi Pendidikan (Fuad, 2018; Ghanbari et al., 2024). Berdasarkan perspektif teori legitimasi Max Weber, kekuasaan politik membutuhkan instrumen sosial dan institusional untuk membangun otoritas yang diakui (Laurano, 2023). Dalam pandangan ini, penguatan ortodoksi Sunni melalui jaringan madrasah dianggap sebagai jalan paling efektif untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil (Fuad, 2018; Ghanbari et al., 2024).

Selain itu, dengan merujuk pada teori modal budaya (*cultural capital*) Pierre Bourdieu, peneliti memandang bahwa proses pendidikan tidak sekadar berkaitan dengan transmisi pengetahuan, tetapi merupakan mekanisme reproduksi nilai, habitus, dan struktur sosial (Habibi & Sholikha, 2025; Hidayah et al., 2025). Madrasah Nizamiyah berfungsi sebagai sarana konversi modal politik menjadi modal simbolik-keagamaan yang kuat. Penggunaan institusi pendidikan secara sadar oleh negara untuk membentuk wacana keagamaan adalah momen bersejarah yang menunjukkan betapa eratnya relasi antara kekuasaan dan pengetahuan (Alfurqan et al., 2020; Miftahur Rofi, 2025).

Beberapa studi sebelumnya telah banyak mengulas Madrasah Nizamiyah dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Efe Yeşildurak (2022) menyoroti sistem kelembagaan, kurikulum, dan metode pengajaran yang terorganisir di bawah kontrol negara (YEŞİLDURAK, 2022). Sementara itu, Sukijan Athoillah (2020) menegaskan posisi Nizamiyah sebagai institusi pendidikan tertinggi di era Saljuk yang memiliki ciri khas berbeda

dari universitas modern dalam hal sistem penggajian dan dukungan sosial-politik (Athoillah, 2020). Selain itu, Rajapov Pirnazar Sardor ogli (2025) menempatkan jaringan madrasah ini sebagai bagian dari reformasi pendidikan untuk menyiapkan kader birokrasi keagamaan negara (ogli, 2025).

Namun demikian, terdapat kesenjangan (*gap*) dalam literatur yang ada. Sebagian besar kajian masih terjebak dalam dikotomi antara pendekatan historis yang kaya data namun lemah secara teoritis, atau pendekatan sosiologis yang kuat secara konseptual namun mengabaikan konteks historis spesifik. Kajian tentang Madrasah Nizamiyah yang menggunakan pendekatan sosiologis-kritis secara mendalam, khususnya dalam khazanah akademik berbahasa Indonesia, masih sangat terbatas (Arifin, 2020; Maryati et al., 2023). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan data sejarah yang kuat dengan analisis teori sosial yang kritis

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengaplikasikan kerangka analitis sosiologi pengetahuan Pierre Bourdieu yang selama ini lebih banyak diterapkan dalam konteks pendidikan Barat pada kasus institusi pendidikan Islam abad pertengahan. Selain Bourdieu, analisis ini juga diperkuat dengan pendekatan hegemoni Gramscian untuk memahami bagaimana kurikulum pendidikan agama membangun konsensus ideologis melalui persetujuan kultural (*consent*), bukan semata melalui pemaksaan doktrin (Özçelik, 2025).

Penggunaan pendekatan interdisipliner ini memungkinkan peneliti untuk melampaui narasi historis konvensional menuju pemahaman yang lebih kritis tentang universalitas mekanisme reproduksi sosial melalui institusi pendidikan (Hidayah et al., 2025; Kamsi, 2022). Dengan mengintegrasikan teori legitimasi Weber, modal budaya Bourdieu, dan hegemoni Gramsci, penelitian ini memberikan landasan teoretis yang lebih komprehensif dalam memetakan hubungan kompleks antara agama dan negara (*religion-state nexus*) (Abd.Rahman Abdullah et al., 2025; Adly Gamal, 2020; Rahman, 2025).

Penelitian ini difokuskan pada analisis Madrasah Nizamiyah sebagai instrumen politik pendidikan yang digunakan oleh Dinasti Saljuk dalam mengonsolidasikan ortodoksi Sunni. Secara deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk: a.) Menganalisis konteks politik dan keagamaan yang melatarbelakangi pendirian Madrasah Nizamiyah pada abad ke-11 M. b.) Mengungkap mekanisme institusional dan strategis yang membuat madrasah ini berfungsi efektif sebagai alat konsolidasi ortodoksi. c.) Menjelaskan peran Nizam al-Mulk dan jaringan ulama dalam merumuskan agenda ideologis melalui institusi tersebut. d.) Mengevaluasi

dampak jangka panjang model kelembagaan Nizamiyah terhadap relasi antara negara dan otoritas keagamaan di dunia Islam.

Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi sosiologi pendidikan Islam serta manfaat praktis bagi pengambil kebijakan pendidikan kontemporer dalam memahami dinamika relasi antara negara dan pendidikan agama.

## METODE

Penyusunan metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai prosedur ilmiah yang ditempuh guna menjawab permasalahan penelitian. Mengingat kompleksitas objek kajian yang melibatkan naskah klasik dan pemikiran tokoh, maka akurasi dalam pemilihan pendekatan serta teknik analisis menjadi kunci utama dalam menjamin validitas hasil penelitian (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-sosiologis (*historical-sociological approach*), yang mengombinasikan metode sejarah dengan analisis sosiologis (Sugiyono, 2013). Karakteristik utama dari jenis penelitian ini adalah sifatnya yang kualitatif-interpretatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk menggali makna mendalam di balik tindakan dan institusi sosial-historis (Sumantri et al., 2021).

Secara epistemologis, kajian ini berpijak pada tradisi hermeneutika kritis. Melalui paradigma ini, peneliti berusaha memahami fakta sejarah Madrasah Nizamiyah bukan sekadar sebagai peristiwa masa lalu, tetapi sebagai hasil dari relasi kekuasaan yang membentuk wacana keagamaan pada masanya. Sebagaimana dikembangkan oleh Bano (2022), pendekatan ini sangat krusial dalam kajian pendidikan Islam untuk mengungkap dimensi kekuasaan dalam setiap analisis institusi keagamaan (Bano, 2022).

Desain penelitian ini dirancang melalui kerangka studi literatur (*library research*) yang mendalam (Zed, 2014). Rancangan ini bertujuan untuk melampaui narasi historis konvensional menuju pemahaman kritis mengenai relasi antara kekuasaan, pengetahuan, dan institusi pendidikan.

Penelitian ini menggunakan desain analisis dokumen dan wacana untuk memetakan bagaimana Madrasah Nizamiyah berfungsi sebagai mekanisme konversi modal politik menjadi modal simbolik-keagamaan. Fokus penelitian ini diarahkan pada empat rumusan masalah utama: konteks politik abad ke-11, mekanisme Madrasah sebagai instrumen politik,

peran tokoh kunci seperti Nizam al-Mulk, serta dampak jangka panjang terhadap relasi negara dan ulama.

Dalam penelitian kualitatif studi literatur, "partisipan" digantikan oleh sumber data tekstual yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan relevansinya terhadap topik. Sumber data dikategorikan menjadi dua: a.) Sumber Primer: Mencakup karya-karya babon yang ditulis pada era atau oleh tokoh yang dikaji, yaitu: *Siyasatnama* karya Nizam al-Mulk, yang memberikan data langsung mengenai filosofi pendidikan dan pemerintahan (Al-Mulk, 1960). *Ihya' 'Ulum al-Din* karya al-Ghazali, sebagai representasi pemikiran ulama utama Nizamiyah (Imām Abī Ḥāmid Muḥammad b. Muḥammad al-Ghazālī, 1937). *Al-Kamil fi al-Tarikh* karya Ibn al-Athir, yang menyediakan kronik sejarah Dinasti Saljuk secara komprehensif (Ibn al-Athir, 1866). b.) Sumber Sekunder: Terdiri dari jurnal ilmiah bereputasi dan buku teks kontemporer yang membahas sejarah Nizamiyah, sosiologi pendidikan (Bourdieu, Weber, Gramsci), serta relasi negara-agama dalam Islam.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman dokumentasi dan bibliografi. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dan penelusuran literatur digital (Zed, 2014).

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi: a.) Identifikasi teks primer yang relevan dengan pendirian Madrasah Nizamiyah. b.) Pengumpulan literatur sekunder melalui pangkalan data jurnal seperti Sinta, Scopus, dan Google Scholar untuk memperkuat kajian teoritis dan empiris. c.) Verifikasi otentisitas data (kritik ekstern) dan kredibilitas isi (kritik intern) terhadap dokumen sejarah yang ditemukan untuk memastikan validitas informasi sebelum dianalisis.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis kontekstual. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap sistematis: a.) Rekonstruksi Historis: Menetapkan fakta-fakta dasar mengenai operasionalisasi Nizamiyah, termasuk sistem kurikulum, pendanaan wakaf, dan dukungan negara. b.) Analisis Kontekstual: Menempatkan fakta tersebut dalam dinamika sosial-politik abad ke-11, khususnya persaingan antara ortodoksi Sunni dan Syi'ah. c.) Interpretasi Sosiologis: Mengaplikasikan kerangka modal budaya Pierre Bourdieu dan teori legitimasi Max Weber untuk mengungkap mekanisme kekuasaan di balik institusi tersebut. d.) Refleksi Kritis: Mengevaluasi temuan untuk melihat relevansi model Nizamiyah terhadap tantangan pendidikan Islam kontemporer, seperti masalah dikotomi ilmu dan integrasi madrasah dalam sistem nasional.

Penggunaan kerangka Gramscian juga disertakan untuk melihat bagaimana kurikulum pendidikan agama bekerja membangun konsensus ideologis atau "consent" melalui proses persetujuan kultural (Wescott, 2022). Analisis ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga memberikan kontribusi teoritis bagi sosiologi pendidikan Islam.

## HASIL

Bagian hasil ini menyajikan temuan-temuan utama terkait peran Madrasah Nizamiyah sebagai instrumen politik pendidikan Dinasti Saljuk. Data disajikan secara objektif berdasarkan rekonstruksi historis dan analisis sumber-sumber yang relevan, tanpa melibatkan interpretasi teoritis mendalam yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Berdasarkan analisis data terhadap sejarah sosial pendidikan Islam pada masa Dinasti Saljuk, ditemukan beberapa kategori temuan utama sebagai berikut:

### Konteks Krisis Legitimasi dan Transisi Kekuasaan

. Data historis menunjukkan bahwa pendirian Madrasah Nizamiyah tidak dapat dilepaskan dari perubahan konstelasi politik di Baghdad setelah kemenangan Dinasti Saljuk atas Dinasti Buwayhi pada 447 H/1055 M (Damayanti et al., 2024; Daulay et al., 2025). Peralihan kekuasaan ini bukan sekadar pergantian dinasti, melainkan pergeseran orientasi ideologis dari dominasi politik Syiah menuju restorasi hegemoni Sunni di pusat dunia Islam, yakni Baghdad sebagai ibu kota Dinasti Abbasiyah yang secara simbolik masih dipertahankan (Hodgson, 1977).

Dalam konteks ini, figur wazir agung Nizam al-Mulk memainkan peran sentral dengan merancang kebijakan pendidikan sebagai instrumen legitimasi politik sekaligus rekonstruksi ortodoksi keagamaan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pendirian jaringan Madrasah Nizamiyah di berbagai kota strategis seperti Nishapur, Isfahan, dan Baghdad, yang berfungsi sebagai pusat kaderisasi ulama Sunni bermazhab Syafi'i dan berteologi Asy'ari (Makdisi, 1981).

Temuan para sejarawan menunjukkan bahwa elit Saljuk yang berlatar Turki nomadik dan relatif baru memeluk Islam tidak memiliki akar budaya-intelektual yang mapan dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Karena itu, strategi legitimasi kekuasaan tidak ditempuh melalui simbol militer semata, melainkan melalui institusionalisasi otoritas ilmu. Madrasah Nizamiyah dirancang sebagai proyek ideologis untuk mengokohkan mazhab Sunni melalui

kurikulum terstandar, patronase terhadap ulama, serta integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas keilmuan (Hitti, 2002).

Dalam perspektif historiografi pendidikan Islam, pendirian Madrasah Nizamiyah dipandang sebagai tonggak lahirnya sistem pendidikan tinggi terstruktur pertama dalam peradaban Islam yang dibiayai negara, memiliki kurikulum baku, tenaga pengajar tetap, dan sistem beasiswa bagi pelajar. Model ini kemudian menjadi prototipe bagi madrasah-madrasah Sunni di wilayah lain (Berkey, 2014).

**Institusionalisasi Pendidikan di Bawah Naungan Negara**

Berbeda secara mendasar dengan lembaga pendidikan pra-Nizamiyah seperti *kuttāb* dan *ḥalaqah* yang bersifat informal, otonom, serta sangat bergantung pada patronase personal ulama atau dermawan, Madrasah Nizamiyah tampil sebagai prototipe institusi pendidikan Islam yang terorganisasi secara sistemik di bawah otoritas negara. Kehadirannya pada abad ke-11 M di bawah inisiasi Wazir Dinasti Saljuk, Nizam al-Mulk, menandai pergeseran penting dari model transmisi ilmu berbasis komunitas menuju model kelembagaan yang terstruktur, terstandar, dan teradministrasi. Sejumlah kajian mutakhir menegaskan bahwa Nizamiyah bukan sekadar ruang belajar, melainkan perangkat ideologis-intelektual negara untuk meneguhkan ortodoksi Sunni sekaligus membangun ekosistem pendidikan tinggi yang berkelanjutan (Abbas et al., 2024).

Temuan data dari berbagai studi menunjukkan bahwa kekuatan kelembagaan Nizamiyah ditopang oleh tiga pilar utama. Pertama, struktur formal yang terstandar. Nizamiyah memiliki kurikulum yang disusun secara sistematis, dengan fokus utama pada fikih mazhab Syafi'i, ushul fikih, hadis, serta ilmu alat seperti nahwu dan balaghah. Proses seleksi mudarris (guru) dilakukan langsung oleh otoritas pusat, sehingga kualitas akademik terjaga dan selaras dengan visi ideologis negara. Standarisasi ini membedakan Nizamiyah dari *halaqah* tradisional yang kurikulumnya sangat bergantung pada preferensi individual guru (Alfurqan et al., 2020; Miftahur Rofi, 2025).

Kedua, sistem pendanaan mandiri berbasis wakaf. Keberlangsungan operasional Nizamiyah tidak dibebankan pada pembiayaan insidental atau donasi temporer, melainkan ditopang oleh skema wakaf produktif yang dirancang secara berkelanjutan. Model ini memungkinkan madrasah memiliki stabilitas finansial jangka panjang, mencakup pembiayaan gaji guru, kebutuhan murid, pemeliharaan fasilitas, hingga pengembangan akademik. Pola

pendanaan semacam ini kemudian menjadi model yang direplikasi oleh banyak madrasah setelahnya di dunia Islam (Alfurqan et al., 2020; Miftahur Rofi, 2025).

Ketiga, penyediaan fasilitas pendidikan yang komprehensif. Nizamiyah menyediakan infrastruktur pendidikan yang jauh melampaui praktik *halaqah* masjid, seperti ruang belajar khusus, perpustakaan, serta asrama bagi murid dan pengajar. Ketersediaan fasilitas ini menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara intensif dan terfokus. Aspek ini memperlihatkan bahwa Nizamiyah telah mengadopsi konsep *campus-based learning* jauh sebelum istilah tersebut dikenal dalam pendidikan modern (YEŞİLDURAK, 2022).

Dengan tiga pilar tersebut, Nizamiyah tidak hanya merepresentasikan evolusi bentuk lembaga pendidikan Islam, tetapi juga menjadi tonggak awal lahirnya sistem pendidikan tinggi yang terinstitusionalisasi dalam peradaban Islam. Model ini kemudian memengaruhi perkembangan madrasah di berbagai wilayah, sekaligus menunjukkan bahwa integrasi antara visi keilmuan, dukungan negara, dan manajemen kelembagaan yang matang merupakan faktor kunci keberhasilan pendidikan Islam klasik.

**Kurikulum Berbasis Ortodoksi Sunni**

Data historis menunjukkan bahwa desain kurikulum Madrasah Nizamiyah tidak bersifat netral secara keilmuan, melainkan merupakan proyek pendidikan yang terstruktur secara ideologis dan politis. Di bawah patronase Nizam al-Mulk, lembaga ini disusun sebagai instrumen standardisasi ortodoksi Sunni di wilayah kekuasaan Bani Saljuk. Fokus utama kurikulum diarahkan pada penguatan fikih Imam al-Syafi'i sebagai kerangka hukum resmi, yang tidak hanya berfungsi sebagai disiplin yuridis, tetapi juga sebagai perangkat normatif untuk menyeragamkan praktik keagamaan masyarakat (Alfurqan et al., 2020; Miftahur Rofi, 2025; YEŞİLDURAK, 2022). Pemilihan mazhab Syafi'i dalam konteks ini bukan sekadar preferensi akademik, melainkan strategi politik-ideologis untuk menciptakan kohesi hukum di tengah pluralitas mazhab pada masa itu.

Pada saat yang sama, teologi Abu al-Hasan al-Ash'ari dijadikan sebagai basis akidah resmi yang diajarkan secara sistematis. Asy'ariyah diposisikan sebagai jalan tengah antara rasionalisme Mu'tazilah dan literalisme ekstrem, sehingga mampu menjadi fondasi teologis yang stabil bagi negara (YEŞİLDURAK, 2022). Dengan demikian, integrasi fikih Syafi'i dan teologi Asy'ari dalam kurikulum Nizamiyah membentuk apa yang dapat disebut sebagai "ortodoksi terinstitusionalisasi".

Selain dua pilar utama tersebut, kurikulum juga diperkaya dengan ilmu-ilmu pendukung seperti hadis, tafsir, nahwu, sharaf, dan balaghah yang berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk memahami teks-teks primer Islam secara otoritatif (Akrim et al., 2022; Alhamuddin & Fanani, 2025; Aminullah et al., 2024). Ilmu kebahasaan tidak diposisikan sebagai disiplin terpisah, melainkan sebagai alat epistemologis untuk menjaga kemurnian pemaknaan wahyu dan sunnah. Struktur ini menunjukkan bahwa kurikulum Nizamiyah dirancang secara integratif antara ilmu normatif, teologis, dan filologis.

Tujuan akhir dari standarisasi kurikulum ini adalah pembentukan kader ulama sekaligus birokrat keagamaan negara yang memiliki keseragaman ideologis, metodologis, dan yuridis (ogli, 2025). Dengan kata lain, Madrasah Nizamiyah berfungsi sebagai pabrik reproduksi ortodoksi Sunni yang terlegitimasi negara, di mana pendidikan menjadi sarana reproduksi kekuasaan simbolik dan stabilitas politik melalui keseragaman pemahaman keagamaan.

**Jaringan Intelektual dan Tokoh Kunci**

Temuan kajian menunjukkan bahwa figur sentral di balik lahirnya jaringan Madrasah Nizamiyah adalah Nizam al-Mulk (w. 485 H/1092 M), wazir Dinasti Seljuk yang tidak hanya berperan sebagai administrator negara, tetapi juga sebagai arsitek kebijakan pendidikan Sunni yang terstruktur. Dalam kapasitas politik-intelektualnya, ia merancang madrasah bukan sekadar sebagai lembaga transmisi ilmu, melainkan sebagai instrumen strategis konsolidasi mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah di tengah kontestasi ideologis abad ke-5 H. Kebijakan pendirian madrasah yang sistematis di berbagai kota besar menunjukkan bahwa proyek ini bersifat terencana, terpusat, dan terhubung dalam satu jaringan intelektual yang saling menopang (Fuad, 2018; Ghanbari et al., 2024).

Jaringan tersebut tersebar di pusat-pusat urban strategis dunia Islam seperti Baghdad yang menjadi prototipe pertama pada 459 H/1067 M serta Nishapur, Basrah, Isfahan, Herat, Balkh, dan Mosul. Sebaran geografis ini bukan kebetulan, melainkan mencerminkan peta politik, ekonomi, dan intelektual wilayah Seljuk. Setiap madrasah berdiri di kota yang telah memiliki tradisi keilmuan dan mobilitas ulama yang tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya sirkulasi pengetahuan, otoritas keilmuan, dan kaderisasi ulama secara lintas wilayah dalam satu kerangka ideologis yang sama (Abbas et al., 2024). Dengan demikian, Madrasah Nizamiyah dapat dipahami sebagai embrio jaringan pendidikan tinggi pertama yang terintegrasi dalam sejarah Islam.

Reputasi dan legitimasi ilmiah jaringan ini semakin menguat dengan keterlibatan ulama-ulama besar sebagai tenaga pengajar, di antaranya Abu Hamid al-Ghazali, yang pernah mengajar di Nizamiyah Baghdad dan memberikan kontribusi besar terhadap otoritas intelektual lembaga tersebut. Kehadiran figur sekaliber al-Ghazali tidak hanya meningkatkan kredibilitas akademik madrasah, tetapi juga memperkuat posisi Nizamiyah sebagai pusat produksi pemikiran teologi, fikih, dan tasawuf Sunni yang berpengaruh luas di dunia Islam (Alfurqan et al., 2020; Miftahur Rofi, 2025). Dalam konteks ini, Madrasah Nizamiyah tidak sekadar menjadi institusi pendidikan, melainkan episentrum formasi ulama dan reproduksi ortodoksi Sunni secara sistemik.

**Visualisasi Data**

Untuk memperjelas temuan mengenai transformasi kelembagaan pendidikan Islam dari pola pra-institusional menuju bentuk institusi negara yang mapan, perbandingan antara model halaqah/kuttab dengan Madrasah Nizamiyah perlu diletakkan dalam konteks sejarah politik-intelektual abad ke-11. Pada fase pra-Nizamiyah, transmisi ilmu berlangsung melalui jejaring ulama yang relatif otonom, berbasis majelis halaqah di masjid, rumah ulama, atau kuttab dasar. Otoritas keilmuan bersandar pada reputasi personal guru dan sanad keilmuan, bukan pada struktur administrasi formal. Situasi ini berubah secara signifikan ketika wazir Dinasti Saljuk, Nizam al-Mulk, mendirikan jaringan Madrasah Nizamiyah di berbagai kota strategis. Lembaga ini bukan sekadar tempat belajar, melainkan instrumen politik-ideologis untuk menguatkan ortodoksi Sunni (khususnya fikih Syafi'i dan teologi Asy'ari) di tengah rivalitas dengan Syiah Ismailiyah dan pengaruh Buwaihiyah sebelumnya (Chamberlain, 1995).

**Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Lembaga Pendidikan Islam Pra-Nizamiyah dan Madrasah Nizamiyah**

| Aspek Perbandingan | Lembaga Pra-Nizamiyah (Halaqah/Kuttab) | Madrasah Nizamiyah |
|---|---|---|
| Sifat Otoritas | Otonom/ Bergantung Patron Individu/ulama | Di bawah naungan negara secara penuh (kebijakan wazir) |
| Kurikulum | Bervariasi, tergantung guru & tradisi lokal | Terstandar (Fikih Syafi'I & Asy'ariyah) |
| Sistem Pendanaan | Donasi tidak tetap / mandiri | Wakaf produktif yang terorganisir |
| Seleksi Pengajar | Berbasis reputasi individu spontan (ijazah/sanad) | Diseleksi dan diangkat oleh negara |
| Fasilitas | Terbatas (masjid/rumah) | Kompleks bangunan khusus & asrama |

Pemetaan di atas menunjukkan bahwa Madrasah Nizamiyah merepresentasikan fase institusionalisasi pendidikan Islam yang terhubung langsung dengan proyek stabilisasi politik Dinasti Saljuk. George Makdisi menegaskan bahwa madrasah dalam format ini merupakan bentuk awal "*college*" dalam peradaban Islam, karena memiliki struktur wakaf, kurikulum, tenaga pengajar tetap, dan fasilitas fisik permanen (Makdisi, 1981).

Selain transformasi struktur kelembagaan, sebaran geografis Madrasah Nizamiyah memperlihatkan korelasi kuat antara pendidikan, administrasi negara, dan pusat keramaian politik.

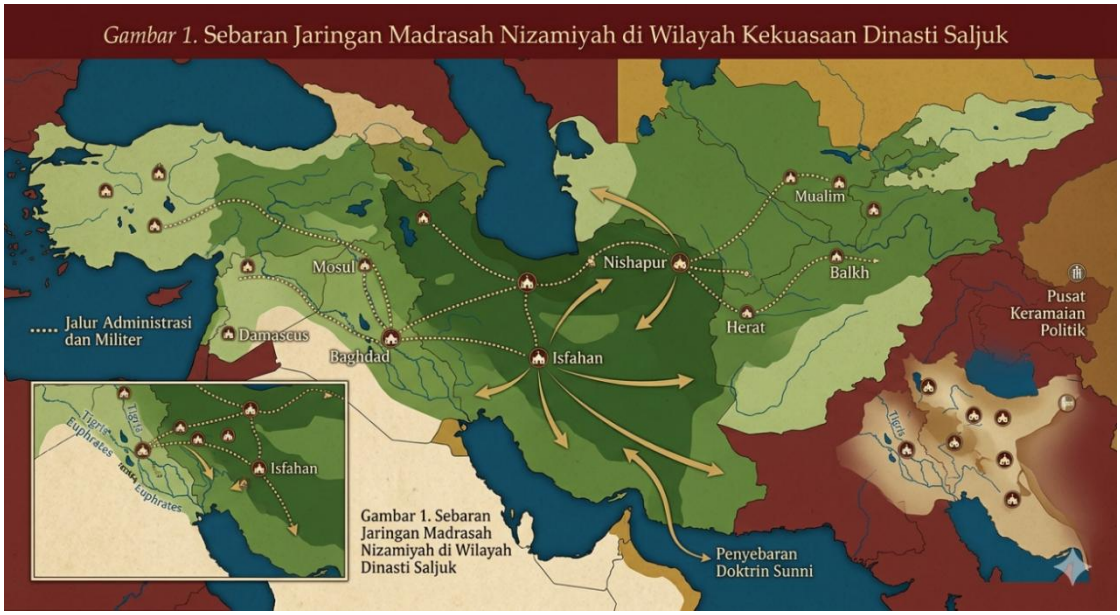


**Gambar 1. Sebaran Jaringan Madrasah Nizamiyah di Wilayah Kekuasaan Dinasti Saljuk**

Data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa penempatan madrasah mengikuti jalur administrasi dan pusat keramaian politik, memastikan bahwa doktrin Sunni dapat tersebar secara efektif ke seluruh wilayah kekaisaran.

Jaringan madrasah ini berdiri di kota-kota strategis seperti Baghdad, Nishapur, Isfahan, Balkh, dan Herat semuanya merupakan simpul administrasi, perdagangan, dan intelektual pada masa Saljuk. Penempatan ini bukan kebetulan geografis, melainkan strategi ideologis: memastikan transmisi doktrin Sunni melalui jalur birokrasi dan pusat urban yang memiliki daya sebar sosial tinggi (Berkey, 2014). Dengan demikian, madrasah berfungsi sebagai medium reproduksi elite intelektual yang sekaligus loyal terhadap ortodoksi keagamaan dan stabilitas politik negara.

Temuan ini menegaskan bahwa Madrasah Nizamiyah tidak dapat dipahami semata sebagai evolusi pedagogis, tetapi sebagai inovasi institusional yang menyatukan pendidikan, wakaf, dan politik ortodoksi dalam satu desain sistemik.

**Data Negatif / Anomali**

Meskipun Madrasah Nizamiyah kerap diposisikan dalam historiografi pendidikan Islam sebagai model ideal integrasi antara otoritas ilmu dan kekuasaan politik, sejumlah temuan akademik mutakhir justru menunjukkan adanya dinamika internal yang lebih kompleks dan tidak sepenuhnya linier dengan tujuan konsolidatif negara.

Pertama, resistensi birokrasi dan negosiasi tradisi pedagogi. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa relasi antara otoritas negara Seljuk dan otoritas keilmuan ulama di Nizamiyah tidak selalu berada dalam pola kontrol satu arah. Para ulama, terutama yang memiliki otoritas keilmuan tinggi seperti Al-Ghazali, tetap mempertahankan independensi epistemik dalam praktik pengajaran. Hal ini terlihat dari keberlanjutan metode talaqqi, halaqah, dan transmisi sanad keilmuan yang tetap berorientasi pada tradisi ilmiah Islam klasik, bukan sepenuhnya tunduk pada skema administratif negara. Asrori dkk. (2025) menegaskan bahwa terdapat ketegangan laten antara struktur birokrasi yang menuntut standarisasi dan tradisi keilmuan ulama yang bersifat personal, otoritatif, dan berbasis sanad (Asrori et al., 2025). Kondisi ini melahirkan ruang negosiasi di mana kontrol negara terhadap kurikulum dan praktik pedagogi tidak pernah benar-benar absolut, melainkan selalu dimediasi oleh otoritas ilmiah para guru.

Kedua, perbedaan mendasar dengan konsep universitas modern. Meskipun dalam banyak literatur populer Nizamiyah disebut sebagai "*prototipe universitas*", analisis historis yang lebih cermat menunjukkan perbedaan struktural yang signifikan. Athoillah (2020) menekankan bahwa sistem kelembagaan Nizamiyah tidak dibangun atas prinsip otonomi institusional seperti universitas modern, melainkan sangat bergantung pada patronase politik wazir Nizam al-Mulk dan legitimasi dinasti Kesultanan Seljuk (Athoillah, 2020). Skema penggajian guru berasal langsung dari kas negara, orientasi kurikulum diarahkan untuk mendukung ortodoksi Sunni yang menjadi ideologi resmi kekuasaan, dan stabilitas lembaga sangat rentan terhadap perubahan dinamika politik istana. Hal ini berbeda secara prinsip dengan universitas modern yang mengedepankan independensi akademik, keberlanjutan kelembagaan, dan diversifikasi sumber pendanaan.

Ketiga, keterbatasan akses pada fase awal pendirian. Walaupun secara normatif Nizamiyah diproyeksikan sebagai pusat penyebaran ajaran Sunni secara luas, ogli (2025) menunjukkan bahwa pada fase awal operasionalnya, akses pendidikan di lembaga ini lebih banyak dinikmati oleh calon-calon elit birokrasi dan kader intelektual yang akan mengisi posisi strategis dalam struktur pemerintahan (ogli, 2025). Hal ini selaras dengan fungsi politis lembaga sebagai instrumen reproduksi kelas terdidik yang loyal terhadap negara. Pendidikan massal bagi masyarakat lapisan bawah belum menjadi orientasi utama, sehingga peran Nizamiyah pada tahap awal lebih bersifat kaderisasi elit ketimbang pemerataan pendidikan.

Dengan demikian, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa Madrasah Nizamiyah tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai alat hegemoni negara ataupun sebagai embrio universitas modern, melainkan sebagai arena interaksi kompleks antara kekuasaan politik, otoritas keilmuan, dan dinamika sosial yang terus dinegosiasikan sepanjang sejarah keberlangsungannya.

## PEMBAHASAN

### Konteks Politik dan Keagamaan Abad ke-11 M

Temuan menunjukkan bahwa pendirian Madrasah Nizamiyah bukanlah sebuah peristiwa pendidikan yang berdiri sendiri, melainkan respon terhadap krisis legitimasi. Dinasti Saljuk, sebagai pendatang baru dari etnis Turki, memiliki kekuatan militer yang besar namun lemah secara kultural dan intelektual. Dominasi Dinasti Buwayhi (*Syiah*) sebelumnya telah meninggalkan jejak ideologis yang kuat di Baghdad. Oleh karena itu, pendirian Nizamiyah merupakan upaya Saljuk untuk "Matahari Sunni" kembali bersinar. Secara mendalam, hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam, institusi pendidikan seringkali lahir dari rahim ketegangan geopolitik. Negara membutuhkan validasi dari kelas intelektual (ulama) untuk menjustifikasi kekuasaan mereka di mata rakyat yang mayoritas Sunni.

### Mekanisme Nizamiyah sebagai Instrumen Politik

Mekanisme utama yang ditemukan adalah sistem birokratisasi ilmu. Melalui pemberian gaji tetap kepada mudarris (dosen) dan beasiswa kepada pelajar yang bersumber dari dana wakaf negara, Saljuk secara efektif mengontrol kurikulum. Penyeragaman mazhab (Syafi'i dalam fikih dan Asy'ariyah dalam teologi) berfungsi sebagai standar ortodoksi yang membedakan kawan dan lawan politik. Hal ini menjawab tujuan penelitian bahwa Nizamiyah berfungsi sebagai "pabrik" birokrat. Para alumni tidak hanya menjadi ahli agama, tetapi juga

mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan (qadi, sekretaris negara, wazir), sehingga seluruh lapisan birokrasi memiliki frekuensi ideologis yang sama dengan penguasa.

**Peran Nizam al-Mulk dan Jaringan Ulama**

Nizam al-Mulk bertindak sebagai arsitek utama yang menghubungkan kepentingan istana dengan kebutuhan ulama. Ia memahami bahwa ulama memiliki pengaruh massa yang tidak dimiliki tentara. Dengan merekrut tokoh-tokoh besar seperti Imam al-Haramain al-Juwaini dan kemudian al-Ghazali, Nizam al-Mulk memberikan "panggung" bagi ulama untuk menyebarkan pemikiran mereka, asalkan tetap dalam koridor dukungan terhadap stabilitas dinasti. Ini adalah implementasi agenda ideologis yang sangat halus namun masif, di mana kolaborasi ini menciptakan simbiose mutualisme: ulama mendapat fasilitas, negara mendapat legitimasi.

**Dampak Jangka Panjang terhadap Relasi Negara-Ulama**

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dampak jangka panjang Nizamiyah adalah terciptanya pola "Islam Resmi" atau *State Islam*. Sebelum Nizamiyah, pendidikan Islam bersifat otonom dan cair di masjid-masjid. Pasca Nizamiyah, pola pendidikan menjadi terstruktur dan bergantung pada dukungan finansial negara. Hal ini mengubah relasi negara-ulama menjadi lebih formalistik, di mana negara seringkali memiliki suara dalam menentukan siapa yang layak disebut sebagai "ulama otoritatif."

Hasil penelitian ini memperlihatkan keselarasan dengan teori Modal Simbolik dari Pierre Bourdieu. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur sosiologi pendidikan oleh Hidayah et al. (2025), institusi pendidikan digunakan untuk memproduksi identitas melalui modal simbolik (Hidayah et al., 2025). Madrasah Nizamiyah mengonversi dukungan finansial (modal ekonomi) menjadi kepatuhan ideologis (modal budaya), yang pada akhirnya mengukuhkan kekuasaan Saljuk.

Perbandingan dengan studi Damayanti, Zalnur, & Masyhudi (2024) juga memperkuat temuan bahwa Nizamiyah merupakan puncak dari ortodoksi Sunni. Namun, penelitian ini memberikan perspektif tambahan bahwa ortodoksi tersebut tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap tantangan zaman (Damayanti et al., 2024). Jika dibandingkan dengan temuan Bano (2022) mengenai otoritas Islam di Eropa, terlihat pola yang sama di mana pusat-pusat produksi pengetahuan selalu beririsan dengan kepentingan otoritas yang sedang berkuasa untuk menjaga stabilitas sosial (Bano, 2022).

Namun, terdapat perbedaan menarik jika dibandingkan dengan penelitian Sumantri et al. (2021) mengenai modernisasi pendidikan. Jika modernisasi seringkali memisahkan agama dari negara, model Nizamiyah justru menunjukkan bahwa kejayaan intelektual Islam klasik justru dicapai melalui integrasi yang sangat erat antara keduanya (Sumantri et al., 2021). Perbedaan ini memberikan pelajaran berharga bahwa efektivitas lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada kemampuannya menyelaraskan diri dengan konteks sosial-politik di mana ia berada.

Temuan ini memperkaya teori sejarah pendidikan Islam dengan konsep "Pendidikan sebagai Katup Penyelamat Negara." Penelitian ini membuktikan bahwa stabilitas sebuah peradaban tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi pada sejauh mana negara mampu mengelola narasi keagamaan melalui pendidikan. Secara teoritis, ini memberikan penguatan bagi pendekatan interdisipliner sebagaimana disarankan oleh Saumantri (2024) dalam melihat fenomena keagamaan tidak hanya dari sisi teks, tetapi juga dari sisi sosiopolitik (Saumantri, 2022).

Bagi pengelola pendidikan Islam masa kini, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris mengenai pentingnya manajemen wakaf dan kemandirian finansial. Nizamiyah bertahan dan berpengaruh karena didukung oleh sistem wakaf yang kuat (Istikomah et al., 2025). Lembaga pendidikan Islam kontemporer dapat mengambil pelajaran bahwa untuk memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan negara atau pasar, mereka harus memiliki kemandirian ekonomi. Selain itu, implikasi terhadap kebijakan kurikulum menunjukkan bahwa pendidikan harus mampu menjawab tantangan ideologis zamannya, sebagaimana Nizamiyah menjawab tantangan Syiah dan kebatinan pada masanya.

Penulis mengakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada sifatnya yang murni studi literatur. Analisis yang dilakukan sangat bergantung pada teks-teks sejarah dan interpretasi peneliti terdahulu, sehingga mungkin terdapat bias narasi yang terlalu memuja (romantisasi) atau terlalu mengkritik Dinasti Saljuk. Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana respon masyarakat akar rumput (*non-elit*) terhadap standarisasi ortodoksi yang dilakukan oleh Nizamiyah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk a.) Menggunakan pendekatan arkeologi atau filologi terhadap manuskrip-manuskrip kurikulum asli madrasah untuk melihat secara detail materi harian yang diajarkan. b.) Melakukan studi komparatif dengan institusi pendidikan non-Sunni pada masa yang sama untuk melihat dialektika intelektual yang terjadi.

c.) Meneliti lebih lanjut mengenai peran perempuan dalam lingkungan pendidikan sekitar Nizamiyah, yang selama ini sering terabaikan dalam narasi sejarah mainstream.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian Madrasah Nizamiyah oleh Dinasti Saljuk pada abad ke-11 merupakan strategi politik pendidikan yang sistematis untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan membangun hegemoni ortodoksi Sunni.

Temuan utama penelitian ini mengonfirmasi bahwa Madrasah Nizamiyah berfungsi sebagai instrumen negara untuk mengisi kekosongan struktur formal pendidikan Islam melalui kurikulum terstandar, tenaga pengajar terseleksi, dan pendanaan wakaf yang berkelanjutan. Nizam al-Mulk memainkan peran sentral sebagai arsitek yang mengonversi modal politik menjadi modal simbolik-keagamaan guna memberikan legitimasi kepada penguasa Saljuk di hadapan masyarakat Muslim. Lembaga ini berhasil meredam pengaruh ideologi pesaing (Syiah Buwayhi) dan memperkuat tradisi intelektual Sunni (mazhab Syafi'i dan Asy'ariyah) yang dampaknya melampaui batas politik dinasti tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam tiga aspek utama secara teoritis berhasil mengaplikasikan kerangka sosiologi Bourdieu (modal budaya dan reproduksi sosial) dalam konteks institusi pendidikan Islam abad pertengahan, menunjukkan universalitas mekanisme kekuasaan dalam pendidikan lintas budaya. Secara Metodologis: Menawarkan pendekatan integratif antara sejarah institusional dan sosiologi kritis untuk menghindari simplifikasi dalam melihat relasi antara ulama dan negara. Secara Praktis: Memberikan preseden historis bagi pengambil kebijakan pendidikan Islam kontemporer mengenai pentingnya standarisasi kurikulum dan integrasi antara ilmu agama dan umum guna menghadapi tantangan global.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan dalam penelitian ini, diajukan beberapa saran untuk studi lanjutan Perluasan Analisis Komparatif: Melakukan studi komparasi yang lebih mendalam antara Madrasah Nizamiyah dengan institusi pendidikan di wilayah lain pada periode yang sama untuk melihat variasi pola intervensi negara terhadap pendidikan. Kajian Dampak Sosial-Ekonomi: Meneliti lebih spesifik mengenai efektivitas pengelolaan wakaf produktif pada masa itu dan dampaknya terhadap mobilitas sosial masyarakat kelas bawah di sekitar jaringan madrasah. Perspektif Keberlanjutan di Indonesia: Mengkaji secara empiris bagaimana pola integrasi kurikulum Nizamiyah diadaptasi dalam transformasi madrasah

kontemporer di Indonesia untuk mengatasi dikotomi ilmu agama dan sekuler secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA


Abbas, N., Rochmawan, A. E., & Astoko, D. B. (2024). The role of classical Islamic educational institutions before the emeregence of madrasah. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 8*(1), 134–146. https://doi.org/10.30829/juspi.v8i1.19895

Abdullah, A. R., Hilmy, M., & Erawati, D. (2025). Relevansi Sosiologis Pendidikan Islam di Era Disrupsi: Menakar Ulang Prinsip-Prinsip Tauhid dalam Arus Modernisasi dan Globalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 4*(1), 555–567. https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4471

Adly Gamal, M. (2020). Teaching Islam in an international school: A Bourdieusian analysis. *Religions, 11*(7), Article 338. https://doi.org/10.3390/rel11070338

Akrim, A., Setiawan, H. R., Selamat, S., & Ginting, N. (2022). Transformation of Islamic education curriculum development policy in the national education system. *Cypriot Journal of Educational Sciences, 17*(7), 2538–2552. https://doi.org/10.18844/cjes.v17i7.7685

Alfurqan, Deprizon, & Hidayat, A. T. (2020). Perkembangan Madrasah Nizamiyah (Analisis terhadap Lembaga dan Kurikulum Pendidikan Islam). *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama dan Humaniora, 24*(2), 186–193. https://doi.org/10.37108/tabuah.v24i2.359

Al-Ghazālī, A. Ḥ. M. ibn M. (1937). *Iḥyāʾ ʿulūm al-Dīn*. https://archive.org/details/Ihya1937/Ihya-1937-V001/

Alhamuddin, & Fanani, A. (2025). Revisiting the curriculum of Madrasah Nizhamiyah: Inspirations for contemporary Islamic education in Indonesia. *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam, 6*(1), 55–61. https://doi.org/10.56874/eduglobal.v6i1.2171

Aminullah, Mujahidin, Yussuf, A. B., Syahabuddin, & Salenda, K. (2024). The impact of madrasah integration in the national education system on the academic quality of Madrasah Aliyah alumni in South Sulawesi. *Ulumuna, 28*(2), 1017–1048. https://doi.org/10.20414/ujis.v28i2.1091

Arifin, Z. (2020). Sociological approaches in Islamic education study. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 4*(1), 131–139. https://doi.org/10.30651/sr.v4i1.5055

Asrori, S., Isma'il, M., & Shabbir, A. (2025). Navigating bureaucratic pressures and preserving Islamic pedagogy: Institutional strategies of Mu'allimin pesantren. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 23*(2), 416–429. https://doi.org/10.32729/edukasi.v23i2.2294

Athoillah, S. (2020). Model Sistem Institusi Madrasah Nidzamiyah di Era Dinasti Saljuk. *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam, 3*(2), 33. https://doi.org/10.30659/jspi.v3i2.15533

Bano, M. (2022). Islamic authority and centres of knowledge production in Europe. *Journal of Muslims in Europe, 11*(1), 20–35. https://doi.org/10.1163/22117954-BJA10046

Berkey, J. P. (2014). *The transmission of knowledge in medieval Cairo: A social history of Islamic education*. Princeton University Press.

Chamberlain, M. (1995). *Knowledge and social practice in medieval Damascus, 1190–1350*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511563492

Damayanti, N. Y., Zalnur, M., & Masyhudi, F. (2024). Analisis Kritis Madrasah Nizamiyah, serta Pengaruhnya terhadap Perkembangan Pendidikan Islam dan Ortodoksi Sunni. *TSAQOFAH, 4*(6), 4060–4072. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.4018

Daulay, S. Y., Hasibun, Z. E., & Novianto, E. (2025). Madrasah Nizhamiyah dalam Perspektif Politik Pendidikan Islam: Analisis Historis dan Implikasi Sosio-Intelektual. *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan, 2*(3), 688–698.

Fuad, A. N. (2018). Nizam al-Mulk dan Kontribusinya terhadap Pemikiran Politik Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 13*(1), 139–164. https://doi.org/10.15642/islamica.2018.13.1.139-163

Ghanbari, D., Mohammadi, M., & Sakha, J. (2024). A review of the political and cultural life of Nizam al-Mulk and his role in the relations between the Iranian Seljuks and the Abbasid Caliphate. *Journal of Social-Political Studies of Iran's Culture and History, 3*(5), 210–225. https://doi.org/10.61838/kman.jspsich.3.5.12

Habibi, N., & Sholikha, M. (2025). Kontekstualisasi Teori Bourdieu dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam, 6*(2), 261–273. https://doi.org/10.58577/dimar.v6i2.397

Hidayah, N., Ahid, N., Rahman, Z. A., & Qosim, N. (2025). Preserving identity through education: The role of symbolic capital in cultural reproduction at MMA Bahrul 'Ulum. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman, 10*(1), 53–63. https://doi.org/10.32764/dinamika.v10i1.5865

Hitti, P. K. (2002). *History of the Arabs: From the earliest times to the present*. Palgrave Macmillan.

Hodgson, M. G. S. (1977). *The venture of Islam: Conscience and history in a world civilization*. University of Chicago Press.

Ibn al-Athir. (1866). *Al-kāmil fī al-tārikh* (C. J. Tornberg, Ed.; Vol. 10). Brill. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.77463033&seq=7

Istikomah, Aristianti, D. A., Era Wati, C. D., Muda, R. A., Aulia, A., & Zulaikha, S. (2025). Wakaf sebagai Instrumen Kemandirian Ekonomi Sekolah: Studi pada SMK IB Khalifah Bangsa Metro (Pink Campus). *VOCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan Kejuruan, 5*(3), 118–125.

Kamsi, N. L. (2022). Nizamul Mulk dan Madrasah Nizamiyah: Relasi Lembaga Pendidikan dan Penguasa (Madrasah dan Otodoksi Pendidikan). *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam, 5*(1), 11–24. https://doi.org/10.37092/ej.v5i1.407

Laurano, P. (2023). The 'Arab Spring' as a challenge to the Weberian analysis of Islam. *Intersections: East European Journal of Society and Politics, 9*(3), 107–129. https://doi.org/10.17356/ieejsp.v9i3.1129

Makdisi, G. (1981). *The rise of colleges: Institutions of learning in Islam and the West*. Edinburgh University Press.

Maryati, S., Lestarika, L., Idi, A., & Tri Samiha, Y. (2023). Madrasah as an institution of Islamic education and social change. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam, 4*(2), 317–326. https://doi.org/10.32806/jkpi.v4i2.11

Nizam al-Mulk. (1960). *The book of government or rules for kings* (H. Darke, Trans.). Routledge.

Ozgen, Z., & El Shishtawy Hassan, S. I. (2021). Meaning of a textbook: Religious education, National Islam, and the politics of reform in the United Arab Emirates. *Nations and Nationalism, 27*(4), 1181–1197. https://doi.org/10.1111/nana.12734

Özçelik, T. G. (2025). An Islamically toned neoliberal hegemony project: The Justice and Development Party (AKP) in Turkey. *Society, 62*(4), 501–511. https://doi.org/10.1007/s12115-025-01078-9

Rahman, G. (2025). Reconstructing Islamic identity in modern times: A narrative review of educational reform and intellectual responses. *Sinergi International Journal of Islamic Studies, 3*(1), 29–43. https://doi.org/10.61194/ijis.v3i1.708

Rajapov, P. S. (2025). The contribution of the Seljuk Dynasty to the improvement of the madrasah educational institution. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 5*(4), 120–125. https://doi.org/10.55640/eijmrms-05-04-28

Rofi, M. (2025). Dynamics in classical Islamic education: Between nonformal autonomy and madrasah hegemony (650–1250 CE). *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research, 9*(1), 1–24. https://doi.org/10.14421/skijier.2025.91.01

Saumantri, T. (2022). The harmonization of religion and the state: A study of the Indonesia context. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 2*(1), 1–15. https://doi.org/10.24235/sejati.v2i1.11

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). CV Alfabeta.

Sumantri, S. T., Deliana, N., & Afif, Y. U. (2021). Pendidikan Islam, Modernisasi dan Kolonialisasi: Transformasi Lembaga Pendidikan Jam'iyatul Washliyah Tahun 1930–1942. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 16*(1), 157–174. https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i1.4659

Wescott, S. (2022). The post-truth tyrannies of an evidence-based hegemony. *Education Policy Analysis Archives, 30*(95). https://doi.org/10.14507/epaa.30.6178

Yeşildurak, E. (2022). Nizâmiye Medreseleri: Müfredat ve Öğretim Metotları. *Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 4*(8), 499–512. https://doi.org/10.53718/gttad.1114046

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.